

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Alatas, 1999. *Korpsi sifat dan Fungsi*. LP3ES. Jakarta
- Ermansjah Djaja. 2010. *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Sinar Grafika: Jakarta,
- Effendy, Marwan. 2012. *Kapita selekta Hukum Pidana*, Jakarta,.
- Fuad Fachruddin. (2006). *Agama dan Pendidikan Demokrasi: Pengalaman Muhammadiyah dan Nadhlatul Ulama*. Pustaka Alvabet
- Hamzah, Andi. 2005. *Pemberantasan Korupsi Melalui Jalur Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hartanti, Evi, 2012. *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua. Sinar Grafika: Jakarta.
- Jhon, Echol. 1977. *Kamus Inggris Indonesia*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kimberly, Ann, Elliot. 1999. *Korupsi dan Ekonomi Dunia*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Tindak Pidana korupsi di Indonesia, Normatif teoritis Praktik*. Alumni Bandung
- Mochtar, Lubis. 1995. *Bunga Rampai Korupsi*. LP3ES. Jakarta
- Siregar Yusuf, Muhammad. 2015. *Delik Aduan Dalam Teori Dan Praktek pada sistem Peradilan Pidana*, Medan.
- P.A.F. Lamintang, 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung
- KPK, 2006. *Memahami untuk Membasmi*, Jakarta.
- Kemendikbud, 2011. *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta

W.J.S. Poerwadarminta. 2007. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.  
Jakarta

## **B. Peraturan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi

Undang- Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas peraturan  
Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Mahkamah Agung Republik indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang  
Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi

## **C. Website**

[https://telingasemut.blogspot.com/2016/03/jenis-jenis-pidana-penjasannya.html /](https://telingasemut.blogspot.com/2016/03/jenis-jenis-pidana-penjasannya.html/)  
09 /07 /2019 /12.11

[http://www.dakta.com/news/1949/pengaturan-hak-politik-warga-negara/09 /07 /2019 /12.27](http://www.dakta.com/news/1949/pengaturan-hak-politik-warga-negara/09-07-2019-12.27)

[http://leip.or.id/mengupas-permasalahan-pidana-tambahan-pembayaran-uang-  
pengganti-dalam-perkara-korupsi//09 /07 /2019 /12.35](http://leip.or.id/mengupas-permasalahan-pidana-tambahan-pembayaran-uang-pengganti-dalam-perkara-korupsi//09-07-2019-12.35)

[https://muhammadapryadi.wordpress.com/tentang-ilmu-hukum/nilai-dan-prinsip-  
anti-korupsi/](https://muhammadapryadi.wordpress.com/tentang-ilmu-hukum/nilai-dan-prinsip-anti-korupsi/)